



MEKANISME SIKLUS APBD TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGINGAS

Devina Rahma Adelia

21013010292@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Siti Alisia Asri Suprpto

21013010293@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Aulia Najmi Laily

21013010300@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Annisa Nathania Dewi

21013010307@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Riski Famiyanti

21013010296@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Korespondensi penulis: 21013010292@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *The BOS program is a government effort to provide financial support to primary schools to meet their operational needs. In an increasingly complex educational context, effective management of BOS funds is essential to ensure that the funds are used in a transparent and accountable manner. Therefore, researchers are interested in examining the management of BOS funds at SDN Ngingas. This study collected qualitative data through descriptive and interview methods. In this study, the data collection and analysis method used was interviews, which means direct interaction between researchers and respondents or sources. Primary data was used as the source of data for this research through interviews with one of the parties from the State Elementary School. SD Negeri Ngingas conducted the planning of BOS funds based on the School Work Plan and Budget (RKAS). The implementation of the BOS Fund at SD Negeri Ngingas includes three things in revenue, expenditure, and financing. The administration of SD Negeri Ngingas involved recording all expenditures and receipts related to the BOS funds. The basic form of the accountability report has its own format from the office which is contained in the application. The budgeting structure of SDN Ngingas follows the government's technical guidelines for RKAS, with budget planning conducted about one or two months before the fiscal year. The regulations used for budget planning are in accordance with the technical guidelines for BOS management in 2024 based on Permendikbud Ristek Number 63 of 2023. The school work plan and budget (RKAS) were prepared in accordance with the BOS technical guidelines for budget implementation at SD Negeri Ngingas.*

Keywords: *BOS Funds, Basic Education, Financing Management.*

Abstrak. Program BOS merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada sekolah dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks, pengelolaan dana BOS yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Pengelolaan Dana Bos pada SDN Ngingas. Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif melalui deskriptif dan wawancara. Pada penelitian ini, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan adalah wawancara, yang berarti interaksi langsung antara peneliti dan responden atau narasumber. Data primer digunakan sebagai sumber data penelitian ini melalui wawancara dengan salah satu pihak dari

Sekolah Dasar Negeri .SD Negeri Ngingas melakukan perencanaan dana BOS berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan Dana BOS di SD Negeri Ngingas meliputi tiga hal dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penatausahaan SD Negeri Ngingas dengan melakukan pencatatan terhadap semua pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan dana BOS. Bentuk dasar laporan pertanggungjawaban mempunyai format tersendiri dari dinas yang terdapat pada aplikasi. Struktur penganggaran SDN Ngingas mengikuti petunjuk teknis RKAS dari pemerintah, dengan perencanaan anggaran dilakukan sekitar satu atau dua bulan sebelum tahun anggaran. Peraturan yang digunakan untuk perencanaan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan BOS tahun 2024 berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2023. Rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) disusun sesuai dengan juknis BOS untuk pelaksanaan anggaran di SD Negeri Ngingas.

Kata Kunci: Dana BOS, Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pembiayaan

PENDAHULUAN

Program BOS merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada sekolah dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Biaya operasional, seperti bahan ajar, peralatan pendidikan, listrik, air, dan pemeliharaan sarana prasarana dapat didanai dengan dana BOS. Untuk mencapai tujuan program pendidikan, pengelolaan dana BOS yang efektif sangat penting. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi jika dikelola dengan baik. Dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks, untuk menjamin penggunaan dana BOS yang jelas dan akuntabel, pengelolaan dana BOS yang efektif sangat penting. Hal tersebut penting bagi setiap sekolah untuk memanfaatkan dana sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama sistematis mulai dari perencanaan dan realisasinya.

Program BOS dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi pengelolaannya seringkali terganggu adanya transparansi dan akuntabilitas. Banyak sekolah yang gagal dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana tersebut cenderung digunakan tidak efektif dan efisien. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak ada publisitas dan audit yang dilakukan tentang bagaimana dana BOS digunakan, serta bahwa individu tertentu telah melakukan penyelewengan dan penggelapan dana. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana BOS adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan di tingkat sekolah. Banyak pengelola sekolah, termasuk kepala sekolah dan komite sekolah, yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dana BOS seringkali tidak digunakan secara optimal, bahkan dapat menyebabkan masalah hukum akibat penyalahgunaan dana. Selain itu, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penggunaan dana juga menjadi isu penting. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS agar tercipta akuntabilitas yang lebih baik. Pengelolaan dana BOS tidak hanya menjadi tugas sekolah, melainkan tugas bersama orang tua wali murid, komunitas, dan sekolah.

Dalam meningkatkan pengelolaan dana BOS, pemerintah mendorong implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan MBS pemerintah tahun 2003 mendorong pengelola sekolah untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (Erlangga & Hayati, 2024). Melalui MBS, sekolah dapat mengelola dana BOS secara mandiri dan akuntabel menggunakan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang transparan. Namun, implementasi tersebut masih sering terkendala oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta kurangnya prosedur pembukuan untuk setiap transaksi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait pengelolaan dana BOS di SD Negeri Ngingas.

KAJIAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Revan Dwi Erlangga dan tim (2024) berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar (Studi Deskriptif Penggunaan Dana BOS Sekolah)” bertujuan untuk memahami pengelolaan dana pendidikan, khususnya Dana BOS, yang dapat menjadi acuan bagi lembaga lain dalam menerapkan pengelolaan sesuai regulasi. SMP IT YABIPA dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerima Dana BOS selama dua tahun dan mampu mengelolanya dengan baik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa SMP IT YABIPA melakukan perencanaan anggaran Dana BOS dengan cermat, melalui identifikasi tujuan, prioritas, dan kegiatan operasional yang terukur berdasarkan hasil ANBK. Sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan lembar kerja tahunan dan memanfaatkan sistem RKAS untuk mengelola pengeluaran, sehingga anggaran yang diajukan dapat divalidasi dan diawasi dengan baik. Proses ini berfungsi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, memungkinkan pencairan dana secara bertahap sesuai kebutuhan, dan memperhatikan komponen yang tidak terdaftar dalam RKAS dengan mengajukan alokasi kepada Yayasan. Dalam pelaksanaan anggaran, SMP IT YABIPA menyusun prosedur pembukuan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang mengintegrasikan peraturan dari pemerintah pusat dengan kebutuhan sekolah. Realisasi anggaran ini dikelola oleh bendahara BOS yang bertugas mencatat penggunaan dana. Pengendalian dan pengawasan dana BOS bertujuan untuk memastikan kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Di SMP IT YABIPA, pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan serta BPK (Erlangga dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nurrochman dan rekan-rekannya (2023) berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri” bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SD Negeri 2 Sawahan, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler oleh manajemen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan dilakukan dengan baik oleh kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, berkat penerapan sistem RKAS dan aplikasi ARKAS. Meskipun proses perencanaan dan pelaporan berlangsung efektif dengan metode online dan offline, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi di antara pihak-pihak terkait dan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada anggaran kegiatan belajar mengajar. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya rutinitas dalam pencatatan transaksi dan keterbatasan kemampuan pengelola dana BOS, yang menghambat pelaporan pertanggungjawaban (Nurrochman dkk., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Alya Elita Sjioen dan Stefen Ratu Ludji (2020) berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang” bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS di sekolah tersebut dilakukan secara bertahap. Namun, pengelolaan dana BOS dinilai kurang efektif karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku. Masalah ini muncul akibat pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah, serta adanya alokasi biaya penggunaan dana BOS yang tidak jelas. Selain itu, laporan pertanggungjawaban sering kali terlambat disampaikan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pencatatan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan buku pembantu yang

ditetapkan pemerintah, serta adanya kesalahan dalam pengetikan angka nominal (Sjioen & Ludji, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Trine J. Sarijowan dan Linda A. O. Tanor (2022) berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 di SD Negeri Sulu Kabupaten Minahasa Selatan” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana BOS tahun 2019 di SD Negeri Sulu, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sulu, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan monitoring serta pengawasan, telah sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2019 mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Namun, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan dana BOS, yaitu sumber daya manusia dan keterlambatan dalam pencairan dana cadangan, yang menyebabkan penundaan dalam pembukuan dan pelaporan ke tingkat kabupaten (Ludji & Tanor, 2022).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis yang digunakan yakni menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan wawancara. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana individu membangun makna dan pengalaman dalam suatu fenomena sosial, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perspektif pribadi mereka. Sementara itu pendekatan deskriptif untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi secara objektif. Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, dimana pengambilan data yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara secara langsung dengan salah satu pihak dari Sekolah Dasar Negeri Ngingas yang digunakan sebagai objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS SD Negeri Ngingas diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa. Pengelolaan dana BOS supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam proses pendidikan di SD Negeri Ngingas, maka diperlukan tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

Perencanaan Anggaran

Tahap pertama siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu siklus perencanaan. Perencanaan anggaran merupakan suatu kegiatan yang mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Tahapan perencanaan keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran. SD Negeri Ngingas melakukan perencanaan dana BOS berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Perencanaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS SD Negeri Ngingas diimplementasikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa. Siklus RAKS bersifat tertutup untuk keperluan sekolah sendiri sehingga tidak terpublish. Sebelum merumuskan RKAS diawali dengan melakukan evaluasi diri sekolah serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. SD Negeri Ngingas bersikap terbuka dalam proses perencanaan dimana bersedia menerima saran dan masukan dari komite, guru, dan orang tua/wali

siswa. Ketika proses perencanaan berlangsung, banyak pihak yang merespon positif dan berkomitmen bersama dari seluruh komponen sekolah untuk memajukan SD Negeri Ngingas melalui penyusunan RKAS sekolah.

Tahapan perencanaan keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran. Struktur penganggaran mengikuti Juknis RKAS dari pemerintah. Peraturan yang digunakan sebagai landasan perencanaan anggaran adalah sesuai dengan juknis pengelolaan BOS tahun 2024 berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2023. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Perencanaan anggaran dilakukan satu atau dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran, dengan waktu yang dibutuhkan saat perencanaan sekitar satu bulan yang terdiri dari dua sampai tiga kali pertemuan. Komponen esensial dari penganggaran adalah: 1) rencana, 2) operasional dan sumber daya, 3) keuangan, 4) menyeluruh/komprehensif, dan 5) koordinasi. Penyusunan anggaran dalam perencanaan program BOS SD Negeri Ngingas tanpa disadari ternyata memperhatikan beberapa poin di atas seperti: 1) membuat perencanaan melalui RKAS, 2) perencanaan anggaran disesuaikan dengan keadaan, perubahan lingkungan dan kebutuhan sekolah, 3) penyusunan anggaran telah melibatkan seluruh komponen sekolah.

RKAS SDN Ngingas bersifat internal dan dirancang khusus untuk kebutuhan sekolah. Informasi yang terdapat dalam RKAS tidak dibagikan kepada pihak luar untuk menjaga kerahasiaan dan integritas rencana anggaran serta penggunaan dana. Pendekatan ini memastikan bahwa data dan informasi keuangan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam sekolah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Pelaksanaan Anggaran

Tahap kedua dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu siklus pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan Juknis BOS, di mana kegiatan yang akan dilakukan pihak sekolah telah disepakati dalam RKAS. Pengelolaan dana BOS harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan Dana BOS di SD Negeri Ngingas meliputi tiga hal dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di antaranya sebagai berikut:

- Alur pelaksanaan pendapatan di SD Negeri Ngingas yaitu:
 1. Dana BOS yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa yang tertera dalam Dapodik.
 2. Setelah *cut off* jumlah peserta didik, maka hal ini yang akan menjadi acuan untuk sekolah mendapatkan dana BOS.
 3. Kepala sekolah dan Bendahara menyusun RKAS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang nyata.
 4. Dalam satu tahun pencairan dana BOS dilaksanakan dua tahun yaitu di awal tahun dan di pertengahan tahun.
 5. Selain Dana BOS reguler, sekolah juga mendapatkan dana Bantuan operasional daerah. Yang biasa disebut BOSDA.
- Alur pelaksanaan belanja di SD Negeri Ngingas yaitu:

1. Kepala sekolah, bendahara dan guru mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang kemudian disusun dalam RKAS.
 2. Membuka aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) untuk mulai melakukan pembelanjaan dengan mencari toko yang menjual barang-barang yang dibutuhkan sekolah dan barang tersebut tentunya sudah terdaftar di RKAS.
- Alur pelaksanaan pembiayaan di SD Negeri Ngingas, yaitu pelaksanaan pembiayaan merupakan tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci yang kemudian dapat ditagihkan untuk pembiayaannya. Contoh implementasi yang baru saja dilakukan oleh pihak sekolah adalah pada pemakaian anggarannya berupa renovasi kantin pada bulan Agustus 2024 dengan mengeluarkan dana sekitar Rp2.000.000,00.

Penatausahaan Anggaran

Tahap ketiga dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu siklus penatausahaan. Siklus penatausahaan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan memegang peranan penting dalam proses keuangan secara keseluruhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah. Penatausahaan keuangan daerah dapat mencakup pembukuan dan inventarisasi.

Proses penatausahaan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara SD Negeri Ngingas dengan melakukan pencatatan terhadap semua pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan dana BOS sebagai bentuk akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban. Pencatatan pengeluaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan pembukuan (*Accounting*). Pembukuan dilakukan dengan tujuan agar dana yang digunakan dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien, dan efektif untuk membiayai kegiatan. Pembukuan yang efektif mempunyai indikator untuk mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari prosedur anggaran yang telah ditentukan, mencegah defisit anggaran, dan melakukan verifikasi bahwa anggaran yang ada telah digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Siklus penatausahaan harus menggunakan landasan dan aturan yang ada agar proses untuk memastikan bahwa seluruh transaksi anggaran tercatat dengan benar, landasan dan aturan yang digunakan yaitu mengacu pada beberapa kompetensi Kepala Sekolah salah satunya adalah kompetensi kewirausahaan di sekolah. Aturan ini berlaku sesuai dengan aturan yang dibuat SD Negeri Ngingas dalam usaha mengembangkan kantin dan budidaya ikan. Proses untuk pengelolaan penerimaan usaha tersebut juga dikelola oleh pengurus serta koordinator kantin. Nantinya hasil dari pengelolaan penerimaan ini berasal dari penjualan kantin sekolah dan penjualan hasil dari budidaya ikan. Sedangkan pada proses pengeluaran SD Negeri Ngingas dikelola untuk kebutuhan kantin mulai dari modal untuk membeli barang serta makanan yang akan dijual di kantin. Kemudian untuk pengelolaan pengeluaran budidaya ikan digunakan untuk membeli bibit dan pakan ikan serta hal-hal yang dibutuhkan dalam. Adapun jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pihak SD Negeri Ngingas sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman untuk dijual di kantin.
2. Perbaikan kantin, hal ini sudah dilaksanakan oleh SD Negeri Ngingas pada bulan Agustus 2024 dengan mengeluarkan dana sekitar Rp2.000.000,00.
3. Bibit dan pakan ikan.

Pertanggungjawaban Anggaran

Tahap akhir dari pengelolaan dana BOS adalah siklus pertanggungjawaban. Siklus pertanggungjawaban dimulai dengan laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan

biaya yang dikeluarkan sekolah baik berupa belanja barang maupun jasa. Dimana laporan tersebut harus disertakan kwitansi, nota serta proposal kegiatan yang dilakukan. Bentuk dasar laporan pertanggungjawaban mempunyai format tersendiri dari dinas berupa aplikasi. Selanjutnya penggunaan biaya pendidikan tadi dilaporkan secara bertahap ke instansi terkait Pemerintah Daerah per enam bulan atau per triwulan, nanti juga ada laporan tahunan. Kepala sekolah menyampaikan laporan penggunaan biaya pendidikan kepada bupati melalui kepala dinas pendidikan kabupaten. Ada tiga jenis bentuk peraturan, dalam bentuk website yang disediakan oleh kemendikbud, kemudian ada juga dalam bentuk cetak untuk ditujukan ke dinas kabupaten, juga pelaporan ke kemendagri. Pelaporan keuangan sekolah ini dinilai sangat penting dilakukan karena dapat berkaitan langsung dengan jabatan kepala sekolah.

Kendala yang sering dihadapi dalam tahap pertanggungjawaban adalah jika hal-hal yang dibutuhkan sekolah tidak terdapat dalam juknis pembelanjaan dan tidak dapat dilaporkan. Kemudian pihak toko tidak segera membuat invoice atau SPJ yang dibutuhkan dalam pelaporan. Meskipun terdapat kendala, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu yaitu dengan sesegera mungkin menentukan toko dalam siplah untuk pembelanjanya. Membangun komunikasi aktif terhadap pihak-pihak terkait agar laporan yang disusun tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Pelaporan keuangan dana BOS merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap publik yaitu masyarakat dan orang tua siswa. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Ngingas diterapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini disusun bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa. Tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS yaitu: (1) tahap perencanaan keuangan yang dapat dimulai dari penyusunan rencana anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), (2) tahap pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan Juknis BOS, (3) tahap penatausahaan anggaran yang dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap semua pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan dana BOS sebagai bentuk akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban, dan (4) tahap pertanggungjawaban anggaran dengan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sekolah baik berupa belanja barang maupun jasa. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak selalu tepat sasaran mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan di tingkat sekolah. Masyarakat juga perlu terlibat dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) perlunya peningkatan mengenai pelatihan dan pendidikan bagi kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam

pengelolaan dana BOS. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi seperti SIPLAH dan RKAS, serta pemahaman mendalam tentang regulasi terkait dana BOS, (2) meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaporkan anggaran. Sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan berkala yang melibatkan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat untuk membahas penggunaan dana serta memastikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah, (3) menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih efisien dan akurat. Sekolah dapat menggunakan aplikasi yang lebih terintegrasi untuk memudahkan proses administrasi dan pelaporan, serta memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diakses oleh pihak terkait. Dengan adanya saran tersebut, diharapkan pengelolaan dana BOS di SD Negeri Ngingas dan sekolah-sekolah lain dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu masih berfokus pada satu objek saja yaitu SD Negeri Ngingas, sehingga membatasi generalisasi hasil ke sekolah lain dengan konteks yang berbeda. Selain itu, metode kualitatif yang digunakan tidak menyeluruh menangkap kompleksitas pengelolaan dana BOS di berbagai sekolah. Penelitian ini juga hanya mencakup pengelolaan dana BOS dalam satu periode anggaran, sehingga mungkin tidak mencerminkan perubahan atau perbaikan yang terjadi di periode anggaran berikutnya. Pengaruh eksternal lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana BOS, seperti kebijakan pemerintah yang berubah, kondisi ekonomi, atau masalah sosial lainnya juga masih perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan metode yang lebih beragam agar mendapatkan gambaran yang lebih luas atau komprehensif mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Erlangga, R. D., Suryadi, S., & Hayati, F. (2024). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar (Studi Deskriptif Penggunaan Dana BOS Sekolah)*. *Journal On Education*, 6(2), 10976-10983.
- Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri*. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60-70.
- Sarijowan, T. J., & Tanor, L. A. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 DI SD Negeri Sulu Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 344-352.
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang*. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12-18.